

BAB IV

SIMPULAN

Penelitian ini telah melewati proses kajian literatur; pengumpulan dan pengolahan data; serta pembahasan hasil. Data-data yang didapat dalam proses penelitian ini mencakup data UMK Kabupaten Cirebon dan berbagai daerah pembanding, laju PDRB Kabupaten Cirebon, realisasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri, perkembangan industri di Kabupaten Cirebon, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon, data pencari kerja, serta data penyerapan tenaga kerja. Penulis juga telah melakukan wawancara kepada narasumber kunci, meliputi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Cirebon. Dari keseluruhan proses tersebut, dapat ditarik poin simpulan atas rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam kemudahan investasi sebagai klaster industri Kawasan Rebana ditunjukkan melalui komitmen dalam menyiapkan regulasi kemudahan perizinan, penetapan UMK yang bersaing, serta pembangunan dukungan infrastruktur untuk memaksimalkan potensi lokasi dan konektivitas Kabupaten Cirebon. Kebijakan

kemudahan perizinan diwujudkan dalam penyesuaian penyusunan Peraturan Daerah terkait RTRW, kemudahan AMDAL, dan kerja sama dengan APINDO untuk mendampingi perusahaan industri yang akan masuk ke Kabupaten Cirebon. Dalam kebijakan penetapan UMK, Kabupaten Cirebon menetapkan nominal UMK yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat dan bersaing dengan tingkat UMK kabupaten/kota Kawasan Rebana serta daerah sekitarnya sehingga berpeluang untuk menarik perhatian para investor atau penanam modal. Kebijakan dukungan infrastruktur diambil oleh Kabupaten Cirebon untuk memaksimalkan potensi lokasi Kabupaten Cirebon yang strategis, yaitu berada di Jalur Pantura dan dilewati oleh Tol Trans Jawa, serta potensi konektivitas Kabupaten Cirebon dengan keberadaan lima pintu eksit tol. Harapannya, keunggulan Kabupaten Cirebon yang didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah ini dapat menjadi pertimbangan positif bagi para investor.

- 2) Pemerintah Kabupaten Cirebon mengupayakan penyerapan tenaga kerja melalui penanaman modal yang lebih berfokus pada industri padat karya. Meskipun saat ini serapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Cirebon masih terbilang rendah, upaya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon, khususnya untuk kawasan industri yang telah mulai berdiri, sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari sikap yang diambil oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dalam menghadapi tantangan tingginya *skill gap* antara kompetensi masyarakat Kabupaten Cirebon dengan kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan industri. Untuk membantu masyarakat Kabupaten Cirebon menyelaraskan

kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan kompetensi pada lapangan kerja yang ada, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon terus berupaya melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Bursa Kerja Khusus (BKK). Namun, upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, diperlukan sinergi antara banyak sektor di pemerintahan. Pertemuan-pertemuan yang membahas terkait kawasan industri Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari Kawasan Rebana pun gencar dilakukan untuk mencari solusi atas setiap kendala yang ada. Harapannya, calon tenaga kerja lokal dapat memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kesempatan kerja yang ada sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Upaya penyerapan tenaga kerja juga dilakukan dari sisi DPRD, yakni dengan mendorong kebijakan terkait peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Cirebon.